

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pembangunan pada hakekatnya merupakan suatu upaya kreasi pencerahan yang dilaksanakan secara terencana dan sistematis serta dilakukan oleh segenap aktor dalam suatu negara untuk mencapai suatu kehidupan masyarakat yang dipandang lebih baik. Cara pandang seperti ini menempatkan pembangunan sebagai instrumen antara untuk mewujudkan sasaran yang lebih tinggi, yaitu perwujudan potensi-potensi inheren manusia menuju pencapaian eksistensi dalam arti yang seluas-luasnya. Menurut Amartya (1999), pembangunan itu pada hakekatnya merupakan suatu proses peningkatan kebebasan manusia dalam berbagai bentuk yang bukan saja penting secara sendiri-sendiri, tetapi juga saling mendukung.

Pembangunan berorientasi pertumbuhan (*growth*) yang selama ini diterapkan negara-negara berkembang termasuk negara Indonesia telah membawa sejumlah perubahan yang cukup signifikan. Disamping berbagai prestasi yang berhasil diraih, tercatat pula sejumlah potret kelam yang turut memperburuk citra pembangunan dengan orientasi di atas. Semakin panjangnya barisan kemiskinan, meningkatnya pengangguran, beban hutang luar negeri yang semakin menggila, dan berbagai ketimpangan merupakan hasil akhir yang tidak dapat dipisahkan dari pembangunan itu sendiri. Manfaat pembangunan lebih dirasakan oleh kelompok masyarakat lapisan atas, sehingga jurang kesenjangan sosial dan ekonomi semakin menganga pula. Orientasi pertumbuhan hanya mendorong perkembangan usaha dan industri skala besar, sehingga terjadi kesenjangan yang semakin lebar antara usaha skala kecil dan mikro (UKM) dan usaha menengah-besar (UMB).

Krisis moneter yang meluas menjadi krisis ekonomi yang secara langsung turut pula memberikan kontribusi nyata penyebab kemunduran berbagai kegiatan ekonomi berupa terganggunya kegiatan produksi, distribusi dan konsumsi. Kemunduran drastis berbagai kegiatan ekonomi ini telah mengakibatkan melemahnya daya beli masyarakat (*purchasing power*) yang disebabkan oleh

berkurangnya sumber pendapatan masyarakat, sementara harga-harga kebutuhan hidup terus meningkat.

Orientasi pembangunan ekonomi Indonesia yang lebih menekankan pertumbuhan (*growth*), turut pula memperparah ketimpangan wilayah khususnya di pedesaan. Ekonomi desa tidak memperoleh nilai tambah yang proporsional akibat dari wilayah perkotaan hanya sekedar menjadi pipa pemasaran (*marketing pipe*) dari arus komoditas primer dari pedesaan. Dalam konteks demikian, wajar apabila terjadi pengurasan sumber daya (*backwash effect*) oleh kota terhadap desa secara sistematis dan kota hanya mengambil keuntungan dari jasa distribusi semata, sehingga seringkali terjadi kebocoran wilayah (*regional leakages*) yang merugikan pertumbuhan ekonomi daerah itu sendiri.

Secara sosiologis, desa dipahami sebagai satu kesatuan masyarakat (komunitas) yang memiliki batas-batas wilayah tertentu, di mana anggotanya saling kenal mengenal antara satu dengan yang lainnya dengan baik, dengan corak masyarakat yang relatif homogen.

Desa mempunyai peran yang sama-sama penting dalam pengembangan ekonomi suatu wilayah. Jika peran desa tersebut dapat berjalan dengan baik, hubungan keterkaitan (ekonomi) dalam pembangunan dapat tercapai. Pentingnya peran desa ini dalam jaringan wilayah untuk menciptakan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan sesuai dengan konsep agropolitan (Douglass, 1998). Konsep ini menekankan bahwa pengembangan desa dapat tercapai dengan baik apabila desa tersebut mampu membangun pertumbuhan ekonomi melalui partisipasi masyarakat.

Peran serta masyarakat dalam pembangunan desa dinilai sangat penting untuk dilakukan, sebab masyarakat merupakan pemangku kepentingan dalam penyusunan rancangan kegiatan pertumbuhan ekonomi yang efektif dengan membutuhkan keterlibatan (partisipasi) awal dan nyata dari semua pihak serta penyelenggara dibidang pemerintahan desa.

Penyelenggaraan pembangunan desa didukung pula oleh peran aparat desa dalam memberdayakan masyarakat dibidang pembangunan baik itu pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur yang memadai sebagai wujud tingkat kesejahteraan

yang meningkat. Sikap pemerintah desa terhadap masyarakat dalam pembangunan akan memberikan dampak positif terhadap tradisi gotong-royong masyarakat desa dan menjadikan masyarakat berpartisipasi dalam pembangunan yang dilakukan sehingga pembangunan tersebut akan pertumbuhan yang cepat karena ada rasa tanggung jawab masyarakat terhadap pembangunan tersebut.

Kinerja aparat desa sering kali dikonstruksikan sebagai pamong desa yang diharapkan dapat menjadi pengayom masyarakat. Namun masih ada pengelolaan pemerintah desa yang masih lemah dalam akuntabilitas dan transparansi. Pemerintahan desa merupakan sebuah mekanisme pemerintahan yang dilakukan oleh pemerintah desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dimana aparat desa memiliki kewenangan untuk mengatur, mengurus, memperhatikan kepentingan dan aspirasi yang tumbuh dalam masyarakat sebagai upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Berdasarkan observasi awal yang dilakukan peneliti bahwa kinerja aparat desa Alale Kecamatan Suwawa Tengah Kabupaten Bone Bolango dinilai positif, dimana dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya sebagai penyelenggara pemerintahan telah berjalan sesuai dengan harapan masyarakat, banyak diantara masyarakat memberi apresiasi kepada aparat desa terutama yang memiliki kualitas dan prestasi kerja yang maksimal. Dengan dibekali pendidikan dan pengalaman kerja yang cukup banyak dalam melayani masyarakat, mampu memberikan pengaruh terhadap jalannya roda pemerintahan di Desa Alale. Disamping itu juga mampu mendapatkan perhatian penuh dari masyarakat serta dukungan dalam menyelesaikan pekerjaan yang berkaitan erat dengan kebutuhan masyarakat di desa.

Selain itu desa juga banyak ditingkatkan oleh fasilitas tertentu seperti komputer dan mesin cetak (*print out*) sebagai bentuk penyedia jasa pelayanan administrasi dimasyarakat. Sehingga hal tersebut juga akan mempengaruhi dalam penyelenggaraan pemerintahan yang ada di Desa Alale. Pengelolaan pemerintah desa dalam pemahaman masyarakat dinilai telah maksimal secara akuntabilitas dan transparansi dilingkungan pemerintah desa. Hal yang paling menonjol dalam keberhasilan kinerja aparat desa diantaranya pengembangan sumber daya manusia

yang professional dibidang pelayanan kepada masyarakat, sehingga masyarakat merasa nyaman dalam menerima dan memahami peningkatan kinerja aparat desa.

Dari fenomena yang dideskripsikan sebelumnya merupakan pendorong utama yang menjadi alasan dalam penentuan masalah persepsi masyarakat yang diformulasikan dengan judul: **"Persepsi Masyarakat Terhadap Kinerja Aparat Desa Alale Kecamatan Suwawa Tengah Kabuapten Bone Bolango"**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan pokok permasalahan di atas maka masalah dalam penelitian ini dirumuskan sebagai berikut: Bagaimana persepsi masyarakat terhadap kinerja aparat Desa Alale Kecamatan Suwawa Tengah Kabuapten Bone Bolango?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui persepsi masyarakat terhadap kinerja aparat Desa Alale Kecamatan Suwawa Tengah Kabuapten Bone Bolango.

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Secara Teoritis

1.4.1.1 Hasil penelitian diharapkan dapat menambah pengetahuan tentang persepsi masyarakat terhadap kinerja aparat Desa Alale Kecamatan Suwawa Tengah Kabuapten Bone Bolango.

1.4.1.2 Membantu peneliti dan akademisi dalam mengembangkan kemampuan penulisan karya ilmiah sebagai informasi kepada dunia pendidikan akan pentingnya kinerja aparatur desa.

1.4.2 Secara Praktis

1.4.2.1 Memberikan pengetahuan terhadap kinerja aparatur Desa Alale Kecamatan Suwawa Tengah Kabupaten Bone Bolango.

1.4.2.2 Penelitian ini diharapkan dapat memberi informasi dalam meningkatkan kinerja aparat Desa Alale, serta berguna untuk pengembangan penelitian selanjutnya khususnya menyangkut kinerja aparatur desa.